

ILMU DAN KEKUASAAN: ULAMA DAN POROS-POROS POLITIK

Surianto¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (e-mail: surianto.4002213008@uinsu.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peran ulama dalam kekuasaan dan politik. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan mengulas buku-buku dan sumber pustaka lain yang berkaitan. Ulama adalah orang yang mendalam ilmunya dan pengetahuannya tentang agama Islam beserta cabang-cabangnya. Dalam makna yang lebih luas bahwa ulama adalah intelektual yang tugas dan fungsinya sama dengan cendekiawan. Dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa peran ulama sangat penting dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Hal ini tentu menjadi keharusan bahwa ulama harus berpolitik dalam dakwahnya dimana dengan memegang kekuasaan, dakwah akan lebih mudah. Sebagai pewaris nabi tentunya ulama tetap berpegang teguh kepada Alquran dan hadis dan menolak politik-politik yang menghalalkan segala cara.

Keywords: Ulama, Politik, Kekuasaan.

Pendahuluan

Dalam Alquran telah dijelaskan bahwa Allah swt. akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Penegasan ayat ini bisa dimaknai bahwa menuntut ilmu itu diharuskan bagi setiap insan. Karena salah satu tujuan menuntut ilmu adalah agar manusia menjadi insan yang sempurna.

Dalam sejarah Islam di Nusantara, banyak sekali orang-orang yang beriman dan berilmu dimuliakan Allah kedudukannya di masyarakat. Sebut saja Syekh Nuruddin Ar-Raniry yang merupakan ulama terkemuka saat itu mendapat kedudukan yang tinggi di kesultanan Iskandar Tsani. Dia menjadi pemberi solusi permasalahan kehidupan baik keagamaan, sosial, budaya dan politik.

Salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi pemimpin (khalifah) di muka bumi. Muncullah ulama sebagai orang yang berilmu untuk medakwakan Islam sebagai pemimpin. Pemimpin yang dihormati, diikuti dan didengarkan semua dakwanya. Hal yang wajar jika kekuasaan menjadi tolok ukur dalam kepemimpinan. Tetapi dalam perjalanannya, dalam menggapai kekuasaan banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi. Tidak jarang menggunakan kekerasan ataupun jalan perdamaian. Muncullah politik yang pada dasarnya bertujuan baik, mulai menggunakan cara-cara yang tidak sesuai Islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *library research* atau kajian pustaka yaitu mengumpulkan buku-buku atau sumber lain yang berhubungan dengan Ilmu dan Kekuasaan: Ulama dan Poros-poros Politik.

Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu *'alima*, yang memiliki arti pengetahuan (al Rasyidin, 2015). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan

tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu (Tim Penyusun, 2008). Dalam bahasa Inggris ilmu dapat disamakan artinya dengan *science* yang artinya ilmu pengetahuan. Dalam Alquran surat al-Mujadalah ayat 11, Allah Swt. mengatakan bahwa akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jelas sekali bahwa menuntut ilmu itu sangat dianjurkan dan wajib. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda yang pernah mendengar Nabi Saw. mengatakan bahwa kemudahan untuk menuju surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam kondisi sekarang ini orang-orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang lebih di mata masyarakat, sehingga wajarlah bahwa menguasai ilmu itu pengamalannya untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Salah satu ilmu dalam kehidupan bermasyarakat adalah ilmu politik. Miriam Raharjo mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik (Miriam Budihardjo, 2008). Sebagian orang memahami bahwa politik itu identik dengan kekuasaan. Tujuan orang berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan. Kekuasaan dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai: (1) kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); (2) kemampuan, kesanggupan; (3) daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai (Tim Penyusun, 2008). Dalam bahasa Inggris, kekuasaan disebut sebagai *power*. Arti lain dari *power* adalah kekuatan. Memang benar bahwa sebagian orang percaya bahwa orang yang memiliki kekuatan dari segi fisik (badan) ataupun psikis (akal, sebut saja orang yang berilmu) akan memegang tampuk kekuasaan. Miriam Budihardjo mendefinisikan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku (Miriam Budihardjo, 2008). Jadi bisa dikatakan bahwa untuk memperoleh kekuasaan diperlukan suatu kerangka dasar ilmu yang dapat menopangnya.

Pendekatan sosiologis dalam memegang kekuasaan adalah dibentuknya organisasi-organisasi baik buruh, keagamaan, cendekiawan dan lain-lain, yang salah satu tujuannya adalah menggalang kekuatan agar nantinya dapat merebut kekuasaan. Ini bisa dilihat dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang muaranya adalah untuk menuju kepada kekuasaan. Karena dalam negara demokrasi sebagaimana pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa adanya kebebasan berserikat atau mengeluarkan pendapat.

Ulama, pada dasarnya merupakan suatu pengertian dalam konsep sosial. Karenanya, penelusuran konsep ulama akan merujuk suatu pengertian tentang seorang yang menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain. Oleh karenanya, formulasi ulama adalah mereka yang mengetahui ilmu pengetahuan umum yang berangkat dari pengetahuan keagamaan atau kitab suci (Nor Huda, 2015). Secara etimologi, kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu 'ulama yang merupakan bentuk jamak dari kata 'alim yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmuwan, saintis, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam (Faisal Ismail, 2020).

Dalam perkembangannya, pengertian ulama menjadi lebih khusus. Hal ini dapat dilihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa ulama adalah orang yang ahli dalam hal agama Islam (Tim Penyusun, 2008). Ulama adalah orang yang mendalam ilmunya dan pengetahuannya tentang agama Islam beserta cabang-cabang dalam urusan agama Islam. Sebut saja ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain.

Jika kata ulama diartikan dalam makna yang lebih luas, maka ulama adalah intelektual yang tugas dan fungsinya sama dengan cendekiawan. Ulama memiliki keahlian di bidang ilmu-ilmu yang normatif sedangkan cendekiawan bersifat empiris (Bahrul Ulum, 2015). Jelasnya dalam pengertian yang khusus, ulama adalah orang yang paham dan mendalam ilmunya tentang agama Islam yang meliputi akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan akhlak.

Pemahaman keilmuan ini tentu saja diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren. Sementara itu, seseorang yang mempunyai latar belakang sekolah modern disebut sebagai intelektual (Nor Huda, 2015).

Pemahaman sebagian orang bahwa ulama adalah seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian ilmu-ilmu agama Islam. Predikat tersebut diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam kajian ilmu agama Islam dan untuk menggapai hal tersebut tidaklah mudah. Karena bobot keahliannya dalam suatu bidang kajian ilmu agama Islam, maka seseorang itu dapat dipercaya telah memiliki keahlian dan otoritas dalam bidang kepakarannya tersebut.

Di Indonesia, secara umum dijumpai beberapa gelar atau panggilan yang diberikan kepada ulama. Masyarakat Sunda menyebut ulama dengan ajengan, di Minangkabau ulama dipanggil dengan buya, di Aceh dengan panggilan tengku, di Lombok dengan sebutan tuan guru, di Sulawesi dengan panggilan tofanrita, di Madura dengan panggilan nun atau bandara (Nor Huda, 2015).

Sedangkan di masyarakat Jawa, ada sebutan kiai, yang merupakan gelar kehormatan bagi para ulama. Menurut Adaby Darban dalam Nor Huda, kiai adalah seorang pemuka agama Islam yang memiliki otoritas kharismatik karena kesholehannya, ketinggian ilmu agamanya, kepemimpinannya, dan sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan masyarakat (Nor Huda, 2015). Bisa dikatakan bahwa orang sudah diberikan gelar kiai oleh masyarakat biasanya sudah menunaikan rukun Islam yang kelima sehingga ulama tersebut biasanya diberikan gelar di depan namanya kiai haji atau disingkat KH.

Dalam sejarah emas kebudayaan dan peradaban Islam yang berlangsung dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, kita mengenal ulama berikut bidang kajian kepakaran dan disiplin ilmu mereka. Ada ulama hadits, ulama tafsir, ulama kalam, ulama hukum (ulama fiqh dan ulama ushul fiqh), dan sebagainya. Spesialisasi kepakaran atau keluasan keulamaan seseorang ditentukan oleh bobot penguasaannya terhadap suatu disiplin ilmu yang menjadi bidang keahliannya. Pada masa sejarah keemasan peradaban Islam, kita mengenal nama-nama besar, seperti Abu Hanifah (pendiri Mazhab Hanifah), Malik bin Anas (pendiri Mazhab Maliki), As-Syafi'i (pendiri Mazhab Syafi'i), dan Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab Hambali) sebagai pakar-pakar fiqh atau ulama pemikiran hukum Islam (Faisal Ismail, 2020).

Ada empat tipe ulama atau cendekiawan sesuai bidang kajian dan fungsinya (Faisal Ismail, 2020). *Pertama*, ulama atau cendekiawan tradisional, yaitu seorang ulama atau cendekiawan yang menjadi penyebar ide dan mediator antara masyarakat dengan kelas di atasnya. *Kedua*, ulama atau cendekiawan yang dikelompokkan sebagai organik, yaitu ulama atau cendekiawan yang dengan badan penelitian dan studinya berusaha untuk memberi refleksi atas keadaan, namun terbatas untuk kelompok kepentingan sendiri. *Ketiga*, ulama atau cendekiawan yang dikelompokkan sebagai kritis, yaitu ulama atau cendekiawan yang mampu melepaskan diri dari hegemoni penguasa dan mampu memberikan pendidikan alternatif untuk proses kemerdekaan. *Keempat*, ulama atau cendekiawan universal, yaitu ulama atau cendekiawan yang memperjuangkan proses peradaban dan struktur budaya yang memperjuangkan pemanusiawian dan humanisme serta dihormatinya karhat manusia.

Mengingat ulama adalah ilmuwan, cendekiawan atau intelektual yang karena keilmuannya maka ini merupakan suatu kebenaran bahwa ulama itu kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Secara teologis bahwa ulama itu adalah ahli waris nabi. Dimana fungsi ulama sebagai pelanjut dan pengembangan risalah kenabian yang disampaikan kepada umat manusia. Atas dasar itulah secara sosiologis kedudukan ulama berada pada strata teratas.

Posisi ulama menjadi sangat penting dan strategis karena didasarkan pada realitas sosiologis dan religious. *Pertama*, ulama adalah orang yang menguasai seluk beluk agama

dan mengetahui ilmu pengetahuan ilmu non agama, baik secara teoritis maupun praktis, seperti ilmu perdagangan, pertanian, seni, sains, bahkan politik. Ilmu yang dimiliki ulama menjadi kekuatan bagi mereka untuk menyebarkan dan mengembangkan misi agama dan kemasyarakatan secara mudah. *Kedua*, ulama memiliki pengikut yang pasti. Dimanapun ulama berada, selalu ada pengikut yang setia mengikutinya. Para pengikut umumnya tidak selalu karena ajakan ulama, tetapi semata-mata karena ilmu yang dimiliki dan melihat teladan yang ditunjukkan dalam masyarakat. *Ketiga*, ulama umumnya memiliki tingkat keikhlasan yang tinggi. Pengabdian yang diberikan untuk membina umat adalah pengabdian semata-mata karena melaksanakan misi agama. Ulama selalu konsisten membantu umat dalam berbagai kepentingan, tidak hanya menjalankan misi agama, tetapi juga secara sosial memberikan pelayanan yang tidak kenal waktu, tempat dan pertimbangan materi (Faisal Ismail, 2020).

Sebagian orang ketika mendengar kata politik maka yang tergambar dalam pikirannya adalah sesuatu cara untuk merebut kekuasaan. Padahal definisi politik sendiri adalah ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan) (Tim Penyusun, 2008). Miriam Raharjo mendefinisikan politik sebagai usaha menggapai kehidupan yang baik. Bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada (Miriam Budihardjo, 2008). Jadi menjadi hal yang wajar jika seseorang yang berpolitik akan mempunyai tujuan merebut kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itulah tujuan menggapai kehidupan yang baik akan dapat dicapai.

Dalam mencapai tujuan atau berpolitik, banyak yang mempermudah mencapainya. Ingin praktis dengan menghalalkan segala cara. Paham politik praktis ini yang kemudian disebut sebagai paham yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dalam politik ada istilah, *tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi*. Pragmatisme dalam merebut kekuasaan sering dilakukan untuk suatu tujuan. Berpolitik praktis para elit dengan mengabaikan kebenaran akan merusak citra para elit politik tersebut.

Agak sulit mencari definisi politik praktis secara keilmuan. Dalam artikel ini yang dimaksud dengan politik praktis adalah suatu cara yang dilakukan orang atau kelompok dalam mencapai tujuannya (merebut kekuasaan) dengan cara-cara yang praktis (memudahkan) dalam istilahnya menghalalkan segala cara.

Keterlibatan ulama dalam politik praktis bukanlah hal yang baru. Sejak lama peran ulama dalam politik sudah ada. Keterlibatan ulama dalam berpolitik tentunya mempunyai landasan hukum yang kuat secara syariat. Rasulullah telah mencontohkan terlibat sebagai tokoh politik sebagai pemimpin (khalifah) di kota Madinah. Begitu juga pada masa *khulafaur rasyidin*, ulama cukup berperan dalam proses pembentukan dan pembinaan hukum. Antara ulama dan penguasa (*umara'*) menyatu dalam lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi*. Pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan (23 – 35 H/644 – 656 M), ulama seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas menarik diri dari kegiatan politik praktis dan mengabdikan dirinya dalam kajian ilmu agama (Nor Huda, 2015).

Di Indonesia, pada masa pra-kolonial, hubungan erat ulama dan raja (penguasa) merupakan suatu karakteristik yang menonjol. Pada jaman kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13, hubungan erat ulama-raja telah terjadi. Raja Samudra Pasai saat itu, Sultan Malik al-Zahir sangat gemar belajar Islam kepada para ulama. Ulama dan elite kerajaan sering terlibat dalam sebuah diskusi tentang Islam. Hal yang sama juga terjadi di kerajaan Malaka pada abad ke-15 dimana peran penting ulama dalam kerajaan.

Ulama memiliki jabatan yang terhormat dan penting di dalam kerajaan sebagai penasihat raja dan pejabat resmi istana (Jajat Burhanudin, 2012).

Pada masa kerajaan Aceh dimana raja yang memerintah saat itu adalah Sultan Iskandar Tsani memberikan kedudukan yang tinggi buat ulama sufi Syekh Nuruddin Ar-Raniri sebagai *Qadhi Malikul Adil* dan *mufti*. Dalam sistem pemerintahan sekarang jabatan tersebut serupa dengan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Dengan jabatan tersebut memudahkan seorang ulama untuk lebih menyiarkan agama Islam. Benar saja bahwa beliau diberikan amanah oleh sultan untuk membuat kitab (buku) yang disebut *Bustan* yang terdiri dari tujuh buku berbahasa melayu berisi tentang penciptaan dunia, sejarah nabi dan rasul, kekhalifahan, sejarah kerajaan-kerajaan Islam, politik dan nasihat bagi raja, dan keilmuan seperti filsafat, anatomi dan kedokteran (Jajat Burhanudin, 2012).

Berikut ini contoh ulama di Indonesia yang berpolitik praktis:

KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Lahir di Jombang tanggal 4 Agustus 1940. Sebagian pendapat mengatakan tanggal 7 September 1940. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan KH. Wahid Hasyim (putra dari KH. Hasyim Ashari) dan Solichah (putri dari KH. Bisri Syansuri) (Greg Barton, 2008). Pendidikan dasar dimulai di SD KRIS Jakarta. Melanjutkan pendidikan lanjutan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta di bawah asuhan KH. Ali Maksum. Beliau juga menimba ilmu di Pesantren Tegalrejo, Magelang dan Pesantren Tambakberas, Jombang asuhan KH. Wahab Chasbullah (Greg Barton, 2008). Pendidikan sarjana di mulai dari Al-Azhar Kairo di Mesir tetapi tidak diselesaikan dan lanjut ke Universitas Bagdad. Beliau memulai karir politiknya sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 1984 selama tiga periode. Padal saat Soeharto lengser tahun 1998, PBNU pun membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Gusdur sebagai dewan penasihat. Pergulatan politik gusdur terus berlanjut ketika pemilihan presiden melalui sidang umum MPR dimana Gusdur terpilih sebagai presiden dari poros tengah yang sangat mengemparkan saat itu. Peran Gusdur sebagai presiden yang paling kental adalah ketika membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial (Greg Barton, 2008).

KH. Ma'ruf Amin. Lahir di Tangerang tanggal 11 Maret 1943, merupakan pasangan dari KH. Muhammad Amin dan Hj. Maimoenah. Pendidikan dasar diperolehnya di Sekolah Rakyat Kresek dan sore harinya menimba ilmu di Madrasah Ibtidaiyah Kresek. Melanjutkan pendidikan lanjutan di Madrasah tsanawiyah dan Aliyah di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur tamat tahun 1961. Melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor Jurusan Filsafat Islam. Perjalanan karir politiknya dimulai dari bawah sebagai ketua ranting Gerakan Pemuda (GP) Anshor, ketua GP Anshor tingkat cabang dan akhirnya menjadi wakil ketua NU DKI Jakarta. Berlanjut ke Pengurus Besar (PB) NU sebagai pengurus lembaga dakwah. Beliau terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Utusan Golongan tahun 1971. Tahun 1977 terpilih kembali menjadi anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada masa reformasi, beliau pindah partai ke Partai kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi anggota DPR-RI. Karena panasnya dinamika perpolitikan di PKB akhirnya beliau konsentrasi di NU dan MUI. Di NU sebagai Ketua Umum Syariah (2015 – 2020) dan di MUI sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI (2015 – 2020). Hingga akhirnya tahun 2019 beliau terpilih menjadi wakil presiden yang berpasangan dengan Joko Widodo yang dicalonkan gabungan partai-partai seperti PDI-P, PKB, dan lain-lain (Tim Penulis UNC, 2021).

Ulama yang memiliki peran syiar agama Islam tentu akan menjumpai hambatan dan rintangan dalam pelaksanaannya. Sehingga jalur kekuasaan menjadi pilihan untuk memudahkan syiar tersebut. Dari jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah abad ke-17 sampai abad ke-21, agak sulit menemukan ulama yang tidak berpolitik praktis. Berikut ini adalah dua contoh ulama yang menghindari politik praktis:

KH. Sahal Mahfuz. Lahir di desa Kajen, kecamatan Margoyoso, kabupaten Pati, Jawa Tengah pada 16 Februari 1933 dengan nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam al-Hajini. Sebagian pendapat tanggal 17 Desember 1933. Beliau adalah pasangan dari KH. Mahfudh Salam dan Hj. Badriyah. Menikah dengan Hj. Dra. Nafisah yang merupakan cucu dari KH. Bisri Sansuri, ulama NU yang terkenal. Pendidikan Dasar diperolehnya di Madrasah Ibtidaiyah Kajen (1943 - 1949). Pendidikan lanjutan di Madrasah Tsanawiyah Mathali'ul Falah, Kajen (1950-1953) dan melanjutkan di Pare Kediri (1953-1957), kemudian di pesantren Sarang-Rembang (1957-1960) sampai ke Makkah (1961-1963) bersama ulama yang terkenal Syekh Yasin al-Fadani. Sekembalinya dari Makkah beliau aktif mengajar di Pesantren Sarang-Rembang Jawa Tengah dan sebagai dosen di IAIN Semarang. Karir organisasi kepemudaan dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kemudian di Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Pati, PWNU Jawa Tengah dan PBNU sebagai Rais 'Am mulai 1999 – 2009. Jabatan Ketua MUI juga pernah diembannya mulai tahun 2000 – 2010 yang diawali dari ketua MUI Jawa Tengah. Beliau adalah salah satu ulama yang gemar menulis. Ada tiga kitab berbahasa Arab yang terkenal ditulisnya yaitu *Thariqat al-Husnul ala Ghayat al-Wushul*, *al-Tsamarat al-Hajayniyah*, dan *Faydh al-Hijafi Syarh Nayl al-Raja Manzhumat Safinat al-Naja*. Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk buku ada delapan. Dalam bidang pengembangan masyarakat, beliau mendirikan Balai Pengobatan (BP) yang bertujuan untuk membantu layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Juga bidang ekonomi dan simpan pinjam yang menghindari dari riba. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 dan dimakamkan di kompleks pemakaman Syekh Ahmad Mutamakkin, Desa Kanjen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah (Tim Penulis UNC, 2021).

KH. Uzairon Thaifur. Ulama ini disebut sebagai ulama dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh ini lahir di Magetan, Jawa Timur. Sampai saat ini belum ditemukan tanggal kelahirannya. Sementara wafatnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dalam usia 46 tahun. Beliau adalah putra dari Kiai Khalid Umar Mahmud, pimpinan Pondok pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan Jawa Timur. Pendidikan Dasar diperolehnya di pesantren ayahnya kemudian melanjutkan pendidikan sarnanya ke Universitas Al-Azhar Mesir. Setelah itu melanjutkan di Ummul Quro' Mekah bersama ulama Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani dan Syaikh Yasin al-Fadani. Beliau juga belajar ke India bersama ulama Pemimpin Jamaah Tabligh dunia, Maulana In'amul Hasan al-Kandahlawi. Awalnya beliau aktif dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama daerah Magetan. Karena banyak yang memperlakukan beliau sebagai gerakan dakwah Jamaah Tabligh, dianggap sebagai wahabi maka beliau mengundurkan diri dan fokus ke dakwah Jamaah Tabligh untuk keliling ke Nusantara dan beberapa mancanegara (Tim Penulis UNC, 2021).

Hubungan antara ilmu agama (*baca: agama*) dan kekuasaan politik (*baca: politik*) adalah sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji terutama pada saat sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama dijadikan sebagai legalisasi untuk meraih kekuasaan dan kekuasaan bisa dijadikan kekuatan untuk menyebarkan agama secara menyeluruh. Hal ini bisa menjadikan keuntungan bagi ulama ataupun penguasa, dalam istilahnya disebut sebagai interaksi simbiosis.

Di sisi lain, antara agama dan politik juga terjadi saling “menyerang.” Agama melakukan perlawanan terhadap politik dan politik juga melakukan intimidasi dan penghancuran terhadap agama. Saling mendominasi antara agama dan politik ditentukan dengan otoritas mana yang lebih kuat dan dominan. Hal ini tentu dihubungkan dengan watak dan karakter para elite politik dan elite agama yang sedang berkuasa atau memimpin. Agama akan mengikuti politik jika penguasa lebih *superior* dan begitu juga sebaliknya.

Hubungan simbiosis yang menguntungkan jika agama dapat memainkan perannya sebagai legalitas atau “*stempel*” terhadap politik kekuasaan para elite politik yang sedang

berkuasa. Keadaan yang harmonis akan tercipta jika jalinan agama dan kekuasaan terhubung dengan baik. Penguasa menjamin masyarakat untuk melaksanakan ajarannya dengan aman, damai dan sentosa. begitu juga agama memberi legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan politik.

Keintiman hubungan tersebut bisa dikatakan sebagai hubungan yang sejajar, tidak saling mendominasi dan menguasai satu sama lain melainkan melengkapi dan menguntungkan. Walaupun pada prakteknya tetap saja ada “perselingkuhan” dimana penguasa mencoba untuk melakukan selingkuh dengan menggandeng dari kaum adat, pebisnis, kaum sekuler dan lain-lain yang tujuannya untuk mengamankan kekuasaannya.

Pada masa kesultanan Iskandar Tsani dimana ulama Nuruddin Ar-Raniry diberikan kekuasaan sebagai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, banyak kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan dilakukan oleh sultan. Ar-Raniry memberikan nasehat dan saran bagi sultan yang berhubungan dengan agama dan politik. Beliau juga memberikan masukan dan saran kepada sultan bagaimana fungsinya menjadi penguasa dan khalifah tuhan di muka bumi. Dengan mengutip ayat Alquran, dia menjelaskan kepada sultan tanggung jawab dan kewajibannya kepada rakyat; melindungi yang lemah, dan mendatangkan kebaikan bagi rakyat dan membuatnya dilindungi dan dirahmati tuhan (Azyumardi Azra, 2007).

Pada masa presiden Soekarno, puncak hubungan terbaik dengan ulama adalah dipilihnya wakil perdana menteri kabinet Ali Sastroamijoyo dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Zainul Arifin. Kemudian akhir 1953, dalam sebuah pertemuan atau rapat para ulama di Cipanas, dimana pertemuan tersebut dinamakan Mukhtar Alim Ulama se-Indonesia, memutuskan memberikan gelar kepada Presiden Soekarno sebagai *Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati* yang artinya pemerintah yang sekarang ini berkuasa harus ditaati sesuai surat An-Nisa ayat 59 (Hidayat, 2019).

Pada masa Orde Baru, terjadi ketegangan antara Islam dan pemerintah. Ketegangan itu dapat diibaratkan sebagai ketegangan antara Ka’bah dan Garuda (Dhakidae, 2003). Ka’bah tidak dapat menumbangkan Garuda, begitu juga Garuda tidak dapat sepenuhnya menguasai Ka’bah. Pada setiap gelaran pemilihan umum, Golongan Karya (Golkar) selalu menjadi dominan terhadap dua partai oposisi yaitu PPP dan PDI. Dewi Fortuna Anwar dalam Daniel Dhakidae menyebut bahwa pemilu tak lebih seperti kegiatan upacara. Tokoh-tokoh Islam dihadapkan kepada suatu dilema yang besar. Kemerdekaan berpendapat serasa dibungkam, diintimidasi, ditindas, bahkan ada yang diculik karena dianggap subversif. Presiden Soeharto menganggap kelompok-kelompok yang dimotori ulama harus disingkirkan. Harus ada pemisahan Islam politik dan Islam agama.

Pada tahun 1990-an, kebijakan politik Presiden Soeharto mulai diubah dengan membentuk kelompok cendekiawan yang bernama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan B.J. Habibie sebagai ketuanya (Dhakidae, 2003). Dalam sambutannya, B.J. Habibie mengatakan bahwa pembentukan ICMI ini adalah untuk memperhatikan umat Islam yang selama ini dipinggirkan dalam setiap keputusan dan juga bertujuan untuk memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia.

Setelah Presiden Soeharto jatuh pada tahun 1998, disebut sebagai masa reformasi, keran kebebasan berekspresi dan berserikat menjadi angin segar buat aktivis terutama ulama. Di organisasi yang merupakan basis ulama, Nahdlatul Ulama, mendirikan sebuah partai politik bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanggal 23 Juli 1998. Beberapa ulama yang ikut mendirikan pada waktu itu adalah KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustofa Bisri, dan KH. A. Muhith Muzadi.

Fakta sejarah mengatakan bahwa ketika kerajaan-kerajaan Islam jatuh dan masuknya perusahaan-perusahaan Barat seperti *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) ke Indonesia untuk membangun jaringan perdagangan, peranan ulama di lingkaran kekuasaan

mulai terpinggirkan. Para ulama mulai membangun lembaga pendidikan Islam di luar wilayah kerajaan seperti pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, dan dayah di Aceh. Tempat-tempat tersebut muncul sebagai pusat pengajaran Islam bagi kaum Muslim di berbagai daerah (Jajat Burhanudin, 2012).

Situasi sosial dan kultural pesantren membuat ulama memiliki peran penting tidak hanya sebagai guru agama yang memperkuat religionitas umat Muslim, juga sebagai bagian elite pedesaan yang ikut terlibat dalam urusan sosial politik masyarakat. Karena peran itu pula, ulama menjadi terlibat dalam kemunculan sentiment anti-penjajah di beberapa daerah di Hindia Belanda. Dengan pengalaman Makkah mereka, ulama dianggap sebagai pemimpin yang sah baik dalam bidang agama maupun sosial-politik (Jajat Burhanudin, 2012).

Pada abad ke-19, salah seorang ulama yang mempunyai jaringan dengan Timur Tengah telah mengumandangkan ideologi jihad yaitu Abdussamad al-Palimbani. Beliau menuliskan sebuah buku tentang jihad yang berjudul *Nasihah al-Muslimin fi Fada'il al-Jihad*. Buku ini diyakini sebagai inspirasi masyarakat Aceh untuk melakukan perang jihad melawan penjajahan. Buku ini juga diyakini merupakan karya pertama yang menuliskan tentang jihad (Jajat Burhanudin, 2012).

Pada masa kolonial Belanda, ulama dalam aktivitas politiknya lebih cenderung kepada anti-kolonial. Berbeda dengan peran ulama sekarang, ulama lebih cenderung pragmatis terhadap kegiatan-kegiatan politik. Setiap kali pagelaran politik ini digelar, para ulama dan tokoh agama ikut sibuk menjadi juru kampanye atau terpampang foto ulama dimana-mana dengan dukungan salah satu pasangan calon (paslon).

Sejarah mencatat, sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 memang telah bermunculan agitasi militan terhadap Belanda yang disponsori para elit agama (kiai, haji, guru, dan lain-lain). Mereka berhasil meningkatkan pengaruhnya atas masyarakat petani, sementara institusi keagamaan semacam pondok pesantren dijadikan sebagai instrumen yang efektif bagi kampanye politik dalam menentang penguasa kolonial. Sikap penentangan para ulama dan elit agama atas Belanda itu ada yang berbentuk perang terbuka seperti Perang Jawa (1820 - 1825) atau Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 (Jajat Burhanudin, 2012). Adapula yang berbentuk perang terselubung seperti ditunjukkan oleh Kiai Ahmad Rifa'i, pemimpin Sekte Rifa'iyyah di pedalaman Jawa Tengah.

Sebagaimana hadis Nabi saw. bahwa ulama adalah ahli waris nabi artinya ulama memiliki otoritas untuk menyiarkan dan mengembangkan agama serta membimbing masyarakat dan umat dalam konteks berakhlak yang mulia (Bahrul Ulum, 2015). Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam ulama memiliki peranan yang cukup penting dalam meneruskan misi kerasulan setelah Nabi Muhammad saw. dalam penyebaran dan pengembangan Islam di seluruh dunia.

Seyogianya ulama yang sudah menjadi umara atau berada di lingkaran kekuasaan dapat mencontoh Syekh Nuruddin Ar-Raniry yang diangkat oleh Sultan Iskandar Tsani untuk menjadi pengadil dalam kesultanan dan rakyat saat itu merasa terlindungi hak asasi dan pada akhirnya mentaati pemimpin yang tetap berpegang teguh pada Alquran dan sunnah.

Kesimpulan

Ulama diartikan dalam makna yang lebih luas adalah intelektual yang tugas dan fungsinya sama dengan cendekiawan. Ulama memiliki keahlian di bidang ilmu-ilmu yang normatif sedangkan cendekiawan bersifat empiris. Dalam makna yang sempit, ulama adalah orang yang mendalam ilmunya dan pengetahuannya tentang agama Islam beserta cabang-cabangnya.

Ulama yang dimaknai dalam hadis sebagai ahli waris Nabi, maka peran dalam menyiarkan Islam harus dilakukan dengan keikhlasan. Dalam perjalannya dibutuhkan sebuah

interaksi yang saling menguntungkan dengan penguasa. Tidak akan dapat berkembang Islam jika bertentangan dengan penguasa. Hal ini terbukti ketika masa orde baru dimana Islam dan pemerintah sebagai penguasa tidak ada harmonisasi.

Karena besarnya pengaruh ulama di tengah-tengah masyarakat maka menjadi hal yang wajar jika ulama diperhitungkan dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia yang sudah menganut sistem pemerintahan presidensial. Ulama menjadi rebutan untuk ikut dibujuk mendukung calon pemimpin yang akan diusung.

Dalam hal memberi dukungan kepada calon penguasa atau yang sudah berkuasa, sebaiknya ulama tetap dalam fitrahnya sebagai ahli waris Nabi yang berpegang teguh pada Alquran dan sunnahnya. Dihindari adanya politik jual beli ayat-ayat yang bisa menurunkan kadar keulamaannya.

Daftar Pustaka

- al Rasyidin. (2015). *Falsafah Pendidikan Islam*. Citapustaka Media Perintis.
- Azyumardi Azra. (2007). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Kencana.
- Bahrul Ulum. (2015). *Ulama dan Politik: Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Pustaka Pelajar.
- Dhakidae, D. (2003). Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. In *Gramedia Pustaka Utama*.
- Faisal Ismail. (2020). *NU, Moderatisme, dan Pluralisme*. IRCiSoD.
- Greg Barton. (2008). *Biografi Gusdur*. LKiS.
- Hidayat, A. (2019). Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966). *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(3).
- Jajat Burhanudin. (2012). *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Mizan Publika.
- Miriam Budihardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nor Huda. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Tim Penulis UNC. (2021). *Abad Kejayaan Ulama Nusantara*. Global Press.
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.